



PAPER – OPEN ACCESS

Laki-laki Menjaga Tsunami, Perempuan Menjaga 'Brahma': Pemetaan Potensi Bencana dan Masalah Daerah Rawan Tsunami di Pantai Golo, Desa Wojo, Kabupaten Malang, Jawa Timur

Author : Genta Mahardhika Rozalinna
DOI : 10.32734/lwsa.v2i1.596
Electronic ISSN : 2654-7066
Print ISSN : 2654-7058

Volume 2 Issue 3 – 2019 TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Published under licence by TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara



Laki-laki Menjaga Tsunami, Perempuan Menjaga 'Brahma': Pemetaan Potensi Bencana dan Masalah Daerah Rawan Tsunami di Pantai Golo, Desa Wojo, Kabupaten Malang, Jawa Timur

*Men Maintain Tsunami, Women Maintain 'Brahma': Mapping Potential Disasters and Problems in
Tsunami Prone Areas in Golo Beach, Wojo Village, Malang Regency, East Java*

Genta Mahardhika Rozalinna

Sosiologi FISIP Universitas Brawijaya, Malang 65145, Indonesia

Email : gmrozalinna@ub.ac.id

Abstract

Mapping potential disasters and problems is the basis for knowing disaster risks that will occur. Wojo Village is one of the villages in the southern region of Malang Regency which has the potential of a tsunami disaster. The potential of the tsunami disaster was realized by the community since the cessation of the mining cooperatives in 2015 on Golo Beach. The activity of mapping potential disasters and problems utilize the Participatory Geographic Information System (PGIS) method. This method was carried out by inviting several group representatives to conduct focus group discussions (FGD). The aim is to find potential disaster funding problems according to the perspective of the local community. The result of the process of mapping potential disasters and problems is the emergence of different perspectives between men and women invited as representatives. The male representatives present were able to draw on the map regarding the potential for disasters and the problem in the village was one of which was a tsunami, whereas women's representatives actually looked at potential disasters and problems from the perspective of the family's economic stability. Some male representatives stated that the threat of the tsunami became a male area of control while women's representatives guarded Brahma cattle. When referring to these results, women's groups become gender groups threatened by the risk of a tsunami disaster.

Keywords: Disaster, Gender, Mapping, PGIS, Tsunami

Abstrak

Pemetaan potensi bencana dan masalah merupakan upaya dasar dalam membaca risiko bencana sebelum bencana tersebut benar-benar terjadi. Desa Wojo merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten Malang sebelah selatan yang memiliki potensi bencana karena masuk ke dalam daerah rawan tsunami. Potensi bencana atas tsunami terbaca oleh masyarakat desa justru setelah berhentinya operasional salah satu koperasi pertambangan di Pantai Golo tahun 2015. Kegiatan pemetaan potensi bencana dan masalah dilakukan dengan menggunakan metode Participatory Geographic Information System (PGIS). Metode ini dilakukan dengan cara melakukan penglibatan perwakilan dari beberapa kelompok yang dilakukan dengan model focus group discussion (FGD) dari perwakilan perangkat desa, karang taruna, kelompok tani, kelompok wisata, dan kelompok perempuan. Tujuannya adalah ditemukannya potensi bencana dan masalah berdasarkan sudut pandang masyarakat setempat. Hasil dari proses pemetaan potensi bencana dan masalah adalah munculnya sudut pandang yang berbeda antara laki-laki dan perempuan yang diundang sebagai perwakilan. Perwakilan laki-laki yang hadir mampu mengambarkan dan menuangkan ke dalam peta terkait potensi bencana dan masalah di desa mereka salah satunya adalah rawan tsunami, sedangkan perwakilan perempuan justru memandang potensi bencana dan masalah dari sudut pandang pencapaian keamanan ekonomi keluarga. Beberapa perwakilan laki-laki menyatakan bahwa masalah dan bencana tsunami merupakan wilayah pengawasan laki-laki sedangkan beberapa perwakilan perempuan menyatakan

bahwa menjaga sapi jenis 'Brahma' menjadi upaya terpenting untuk menyelamatkan desa dibandingkan sadar akan potensi tsunami. Bila merujuk pada hasil tersebut maka kelompok perempuan menjadi kelompok gender yang terancam atas risiko bencana tsunami.

Kata kunci: Bencana, Gender, Pemetaan, PGIS, Tsunami

1. Pendahuluan

Tantangan dan ancaman atas berubahnya ruang ekologis suatu masyarakat, menyebabkan sistem sosial serta nilai-nilai yang berkembang selama ini menjadi berubah. Pun halnya dengan kehidupan masyarakat di tepian hutan yang berada di wilayah Pantai Golo. Semenjak tahun 2012, kehidupan masyarakat berubah dari keseharian yang bermata pencaharian sebagai petani di lahan tetelan, berubah menjadi masyarakat penambang. Hanya berselang 3 tahun, izin usaha tambang dicabut sehingga masyarakat harus beradaptasi dengan mata pencaharian yang baru sebagai pengusaha wisata. Usaha wisata ini muncul setelah terbangunnya Jalan Lingkar Selatan (JLS) di tahun 2016, satu tahun setelah ditutupnya kegiatan tambang. Dinamika kehidupan sosial di dalam masyarakat pasca ditutupnya kegiatan tambang justru berpotensi pada munculnya masalah baru yakni ancaman atas potensi tsunami. Potensi tsunami terjadi karena usaha tambang pasir besi melakukan penyedotan pasir di garis pantai yang dekat dengan permukiman warga. Akibatnya adalah meningginya air laut yang mendekati daerah permukiman warga. Namun, perubahan ekologis yang demikian disikapi secara berbeda antara masyarakat laki-laki dan perempuan. Sehingga tulisan ini menjadi penting untuk menjelaskan perbedaan bersikap antara laki-laki dan perempuan dalam merespons potensi bencana yang ditemukan pada saat kegiatan pemetaan potensi bencana dan masalah melalui metode Participatory Geographic Information System (PGIS).

2. Masa Lahir Hingga Masa Hiatus Kegiatan Koperasi Tambang di Pantai Golo

Aktivitas manusia berupa sistem sosial seperti pengetahuan, populasi, nilai-nilai, organisasi sosial, dan teknologi telah berdampak terhadap perubahan ekosistem, dan perubahan ini tentunya berdampak kembali terhadap sistem sosial yang melekat pada diri manusia [1]. Aktivitas manusia berupa kegiatan pertambangan dalam skala kecil maupun besar selalu membawa pengaruh terhadap kelompok masyarakat yang hidup di sekitarnya. Seperti halnya masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar Pantai Golo, Desa Wojo, Kabupaten Malang. Kehidupan masyarakat terancam jauh sebelum berdirinya Koperasi Pertambangan di tahun 2012. Upaya untuk melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan, didahului melalui pendekatan kegiatan keagamaan yang ada pada masyarakat yakni pengajian ibu-ibu [2]. Kehadiran pihak pertambangan pada kelompok pengajian Ibu-Ibu ditandai sebagai lahirnya kegiatan koperasi tambang, walaupun Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) belum muncul kala itu.

Pemicu utama hadirnya pertambangan di Desa Wojo adalah tersimpannya kekayaan alam potensial berupa sektor pertambangan. Kekayaan alam tersebut membuat pihak pemangku kepentingan, yakni Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengaturnya zona potensi tambang melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Jawa Timur tahun 2006-2020. Zona selatan wilayah Jawa Timur didominasi oleh bahan tambang seperti alumino silikat, mineral lempung, kelompok mineral karbonat, kelompok mineral agrerat serta kelompok pasir kuarsa, fosfat, gypsum, dan mineral lain [3]. Wilayah Kabupaten Malang termasuk ke dalam zona selatan wilayah Jawa Timur yang memiliki potensi tambang pasir besi. Pengelolaan pertambangan tersebut diatur di dalam regulasi Pemerintah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang. Namun jika merujuk pada regulasi tersebut, kegiatan tambang yang dilakukan oleh Koperasi Tambang di Desa Wojo masuk ke dalam wilayah yang diperuntukkan bagi pemukiman pada Pasal 46, diperuntukkan untuk wilayah konservasi hutan lindung pada Pasal 54, dan termasuk wilayah rawan bencana pada Pasal 40 ayat 5. Dari regulasi kepengaturan RTRW tersebut, maka kegiatan pertambangan di Desa Wojo menyimpan masalah besar.

Masalah pertama dimulai dari upaya penarikan perhatian yang justru hadir pertama kali melalui kelompok Ibu-ibu. Pemberian sumbangan berupa pembangunan masjid dan jalan desa akan diberikan oleh salah satu partai politik ternama di era zaman orde baru, seperti yang dikutip dalam pembicaraan bersama Ratna (43 tahun):

"...orang sini dagang, tani. Setahu saya ya hanya saya yang lulusan SMA, yang lainnya cuma lulusan SD. Makanya apa-apa saya bantu piye enake deso iki. Listrik belum masuk terus nggawe ublik sing ireng nang tembok-tembok.

Deso sepi banget, sore wis podo cangkruk nang ngarep omah, rame pas ono bocah-bocah KKN. Untung ono orang-orang baik datang, desa ini jadi berkembang. Aku tuku tanah hasil kerja TKW-an di Arab, terus beberapa tahun kemarin sepupuku nyalon jadi anggota DPR, yen ndak salah nyumbang materialan dan uang gawe pembangunan masjid di tanah yang tak tuku. Dulurku kenal apik sama Pak iku sing duwe tambang, sering beri uang, royal tenan uwonge. Ngesaki duwit akeh tenan yo, nyoh rong yuto, nyoh sak yuto, nyoh piro wae, hebat tenan. Kuwi hasil aspalane Bapakne sing duwe tambang nganti JLS kae" [12].

Terjemahan: *Orang di Desa Wojo berdagang dan bertani. Setahu saya ya hanya saya yang lulusan SMA, yang lainnya hanya lulusan SD. Maka dari itu bila ada apa-apa ya saya yang membantu bagaimana baiknya desa ini. Listrik belum masuk terus menggunakan lampu teplok yang hitam-hitam di tembok. Desa ini sepi sekali, jika sore semua duduk-duduk di depan rumah, ramai hanya saat kedatangan anak-anak Kuliah Kerja Nyata (KKN). Untung ada orang baik datang, desa ini berkembang. Saya membeli tanah hasil bekerja menjadi TKW di Arab, lantas beberapa tahun kemarin sepupu saya mencalonkan diri sebagai anggota DPR, jika tidak salah memberikan sumbangan material bangunan dan uang untuk membangun masjid di tanah yang saya beli. Saudara saya mengenal baik Bapak pemilik tambang yang senang memberi uang itu, tidak pelit orangnya. Di sakunya banyak sekali uangnya, ini dua juta, ini satu juta, ini berapa saja, hebat sekali. Itu hasil aspalan Bapak pemilik tambang hingga ke Jalur Lintas Selatan (JLS).*

Pemilik Koperasi Tambang hadir sebagai orang baru yang digambarkan oleh Ratna selaku Ketua Pengajian Ibu-Ibu di Desa Wojo sebagai orang yang sangat baik hati dan tidak pelit mengeluarkan uang. Seperti yang dituliskan oleh Habermas 1962:

when associations "speak" their ideas do not float freely within an ethereal public sphere, rather voices are necessarily to particular individuals or groups, as a consequence voice plays a central role in determining not only what we say in the abstract, but also how we are perceived by others and how we perceive ourselves that is how we become who we are [4].

Perkumpulan ibu-ibu pengajian di Desa Wojo diperkenalkan dengan situasi kekuatan politik atas dua pihak yakni calon anggota legislatif dan pemilik tambang yang mencoba mengintroduksi diri di dalam ruang kegiatan keagamaan. Tindakan yang dilakukan keduanya berdampak pada penggambaran sosok penting nan baik yang bermain sebagai pihak sentral dalam menggantikan peran negara. Negara seharusnya hadir sebagai pihak penyedia pasokan listrik dan pemberi fasilitas publik berupa jalan yang layak, maka dalam situasi ini telah digantikan perannya oleh kedua pihak tersebut. Nyatanya, kebaikan keduanya telah menarik perhatian masyarakat khususnya kelompok ibu-ibu yang pertama kali mengenal pemilik tambang.

Masalah kedua muncul setelah kaum ibu-ibu menceritakan kebaikan pemilik tambang kepada keluarganya masing-masing, para suami dari ibu-ibu yang mengikuti pengajian menjadi sangat familiar dengan kehadiran pemilik tambang. Alhasil, pada tahun 2012 pihak Koperasi Tambang mulai melakukan penjajakan eksplorasi pasir besi yang ada di Pesisir Pantai Golo. Pihak masyarakat dalam konteks ini adalah pemerintah desa dan beberapa laki-laki yang memiliki izin pengelolaan lahan tetelan Perhutani (Pesisir Pantai Golo masuk ke dalam wilayah kekuasaan Perhutani), memperbolehkan pihak pertambangan melakukan kegiatan eksplorasi. Belakangan setelah kegiatan tambang berhenti di tahun 2015, baru diketahui apabila mereka bisa mengantongi izin dari masyarakat karena menggunakan modus reboisasi hutan. Hutan yang gundul lebih baik direboisasi oleh mereka, karena alasan pelestarian hutan kembali. Nyatanya hal tersebut tidak terjadi, masyarakat justru melihat tidak ada kegiatan reboisasi kecuali mulai munculnya beberapa alat berat di sebelah barat pesisir Pantai Wojo. Masyarakat pada tahun itu tidak mengetahui bahwa Pantai Wojo merupakan pantai dengan potensi pasir besi. Masyarakat yang memiliki kegiatan berladang di lahan tetelan milik Perhutani selama berpuluh-puluh tahun lamanya, mulai merasa terganggu akan aktivitas kegiatan pertambangan, sebab mereka mulai dilarang untuk memasuki wilayah tersebut [2].

Masalah ketiga muncul saat masyarakat yang semakin banyak merasa terganggu pasca pelarangan kegiatan berladang oleh pihak Koperasi Tambang. Puncaknya adalah pada pertengahan September 2013, masyarakat mengatakan bahwa perusahaan tambang tersebut merupakan kegiatan ilegal. Tuntutan masyarakat adalah kejelasan izin pertambangan [5]. Tuntutan ini tidak hanya efek dari pelarangan memasuki kawasan tambang, namun juga sedikitnya kesempatan masyarakat sekitar Pantai Golo untuk dapat diserap di dalam kegiatan pertambangan tersebut.

Dalam hal perizinan tambang ini tentunya tidak dapat melepas peran Perhutani selaku pemilik wilayah Pesisir Pantai Golo. Melalui perspektif Politik Ekologi di negara-negara dunia ketiga oleh, Perhutani dapat dimasukkan ke dalam pemetaan aktor dengan dua konfigurasi yang mana sebagai Badan Usaha Milik Negara dan di lain sisi sebagai aktor bisnis [6]. Namun demikian, pihak Perhutani melakukan penolakan wawancara terkait dengan eksplorasi pasir besi di Pantai Golo [7]. Tuntutan masalah perizinan juga dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang terkait transparansi dokumen lingkungan pada usaha pertambangan pasir besi, dan hasilnya adalah kemenangan berada di pihak Walhi pada tahun 2016 [8]. Karena tuntutan itu, sebelum tahun 2016 tepatnya tahun 2015, Koperasi Tambang di Pantai Golo mengalami masa hiatus. Kondisi terhenti sementara ini dapat dilihat dengan berhentinya kegiatan penambangan pasir besi, namun alat-alat berat masih terlihat di lokasi Pantai Golo.

3. Akhir Keputusan Bersikap: Laki-laki Menjaga Tsunami dan Perempuan Menjaga 'Brahma' Melalui Participatory Geographic Information System (PGIS)

- *Kegiatan pertambangan berhenti pada tahun 2015, sebab tidak adanya perpanjangan surat izin penambangan. Kehidupan masyarakat di sekitar Pantai Golo terdampak dengan situasi tersebut, sebab masyarakat mengalami perubahan kebiasaan dan pekerjaan pasca masuknya tambang. Masyarakat sekitar Pantai Golo merupakan masyarakat agraris yang hidup di tepian hutan. Setiap harinya mereka memanfaatkan lahan di antara pohon tegakan (tetelan) untuk ditanami tanaman palawijaya. Cara bertanam seperti itu telah lama dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun, namun semenjak hadirnya aktivitas pra-kegiatan pertambangan, masyarakat terbiasa menerima bantuan materiil dari pengusaha pemilik pertambangan. Bantuan berupa uang diberikan dengan jumlah yang cukup banyak 2 tahun sebelum kegiatan tambang hadir di tahun 2012. Masyarakat menganggap bahwa uang hasil pemberian tersebut bisa dihemat untuk kehidupan sehari-hari, sebab mereka tidak terbiasa memegang uang yang banyak [9].*
- *Menjelang tahun 2012, para laki-laki mengerti bahwa kehadiran 'orang baik' yang selama ini datang di kehidupan mereka sedang ingin meminta dukungan suara agar kegiatan pertambangan dapat segera dioperasikan. 500 tandatangan yang dibutuhkan disampaikan oleh pemilik tambang pada saat ada rapat desa. Masyarakat yang rapat pada saat itu semuanya adalah laki-laki. Selain pada kegiatan rapat desa, kebutuhan akan tandatangan tersebut juga tersampaikan pada ruang-ruang diskusi para laki-laki yakni cangkrukan di tepi jalan yang saat ini menjadi JLS dan khotbah sholat jumat. Sedangkan hal tersebut tidak terjadi di ruang-ruang diskusi para perempuan, selain hanya memberi banyak bantuan berupa uang yang kaitannya untuk menambah keperluan perekonomian keluarga. Materi diskusi yang berbeda telah menyebabkan perubahan cara pandang terhadap ruang fisik yang ada selama ini.*
- *Perubahan cara pandang laki-laki dan perempuan pada ruang sosial menyebabkan perubahan terhadap ruang fisik. Menurut Entrikin dalam [10] the three defining features of place -- location, material form, and meaningfulness -- should remain bundled, place has a plenitude, a completeness, such that the phenomenon is analytically and substantively destroyed if the three become unraveled or one of them forgotten. Ruang ekologis Pantai Golo, Desa Wojo yang memiliki potensial pasir besi di wilayah kawasan Perhutani, seakan-akan membuat masyarakat laki-laki dan perempuan terbagi menjadi 2 kehidupan. Masyarakat yang laki-laki bercocok tanam palawijaya di lahan tetelan milik Perhutani, sedangkan masyarakat yang perempuan banyak yang menjadi ibu rumah tangga, beberapa juga menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). Menjelang masuknya kegiatan tambang, kedua kelompok masyarakat tersebut memiliki pemaknaan yang berbeda terhadap*

lingkungan tempat tinggal mereka. Kegiatan ini dapat terlihat melalui kegiatan pemetaan potensi bencana dan masalah yang ada di masyarakat melalui Participatory Geographic Information System (PGIS).

- *PGIS merupakan alat untuk mengetahui informasi pengambilan keputusan secara bersama yang dilakukan oleh masyarakat berbasis lingkungan dan berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka [11]. Kegiatan PGIS dilakukan pada tahun 2018 bersama masyarakat Desa Wojo dengan dasar tidak adanya peta potensi dan masalah yang dibuat berdasarkan masyarakat lokal pasca berhentinya kegiatan tambang. Proses pemetaan dilakukan dengan melibatkan perwakilan beberapa kelompok masyarakat mulai dari perangkat desa, karang taruna, kelompok tani, kelompok wisata, dan kelompok PKK. Kelima kelompok tersebut akan membuat keputusan bersama dalam menggambarkan peta bencana dan masalah. Kelima peta yang dihasilkan terdiri dari peta dasar desa, persebaran penduduk desa, penggunaan lahan desa, potensi wisata desa, dan potensi bencana desa. Peta dasar desa didapatkan dari data informasi yang dimiliki desa namun diubah menjadi bentuk digital. Pengubahan ke dalam bentuk digital memudahkan masyarakat untuk memberikan gambar-gambar maupun simbol-simbol potensi bencana dan masalah sesuai dengan pengetahuan mereka.*
- *Pada saat proses pembuatan peta melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD), kelompok masyarakat yang telah diundang berkumpul menjadi satu di dalam balai desa. Proses selanjutnya adalah kegiatan mengarsir, memberi simbol-simbol di dalam peta digital yang telah disiapkan. Intruksi pertama adalah semua perwakilan mencoba berfokus pada satu peta namun yang terjadi muncul adalah pernyataan dari beberapa wakil undangan. Antara pihak laki-laki dan perempuan mengambil sikap yang berbeda dalam kegiatan tersebut:*
- *Pernyataan yang dilontarkan oleh salah seorang perangkat desa laki-laki:
"...mbak'e gambar-gambare iki mending dibagi ae, wong wedhok-wedhok iku ndak kirane ngerti yen ditakoni masalah dalan, bencana-bencana, tapi yen kaitane karo wisata mereka pasti luwih ngerti timbangane lanangan. Wong-wong iku malah iso cerito sapi-sapi Brahma sing diingu. Timbangane keleru kabeh informasi nang petane lho" [12].*

Terjemahan: Mbak gambar-gambar peta ini lebih baik dibagi saja, perempuan-perempuan itu tidak mungkin tahu bila ditanyai tentang masalah urusan jalan, bencana-bencana, tetapi kalau keterkaitan dengan masalah wisata mereka pasti lebih mengerti daripada laki-laki. Perempuan-perempuan itu malah bisa cerita tentang sapi-sapi Brahma yang dipelihara. Daripada salah informasi di petanya.

Pernyataan yang serupa juga dilontarkan oleh salah seorang karang taruna laki-laki:

"...teng mriku mawon mbak sing jaler-jaler, mergane iki urusan lanangan yen masalah bencana ngeten iki, sing ngerti lapangan. Yen gampil-gampil niku wadhon-wadhon, gawe kerlip-kerlip kegiatan, omahan, nggih niku tiyang-tiya estri" [13].

Terjemahan: Untuk laki-laki di sana saja mbak, karena ini urusan laki-laki kalau masalah bencana seperti ini, yang mengerti lapangan. Kalau yang mudah-mudah itu perempuan, seperti membuat desa lebih berwarna (lebih banyak kegiatan), urusan rumah, itu baru urusan perempuan.

Beberapa pernyataan perwakilan perangkat desa maupun karang taruna di atas, menunjukkan cara bersikap dalam proses membuat peta melalui PGIS. Terdapat pernyataan-pernyataan yang seakan-akan para laki-laki berusaha memberikan penegasan bahwa pemetaan bencana menjadi wilayah pengetahuan dari mereka. Namun ternyata, pernyataan perwakilan undangan yang hadir dari sisi perempuan menunjukkan cara bersikap yang serupa saat kegiatan pertama adalah memberikan arsiran di peta potensi bencana.

Pernyataan yang dilontarkan oleh salah seorang perangkat desa perempuan:

"...mpun sing estri-estri teng mriki mawon Bu. Ditakoni jeneng-jenenge dalan ora ngerti, ngertine mung nutuk duk, menggok duk, ora ngerti. Mending sampean lungguh kene karo ibu-ibu, podho wedoke kan penak. Mbok menowo sampean ngewenehi masukkan usaha ternak ibu-ibu kene, sapi Brahma" [14].

Terjemahan: Sudah yang perempuan-perempuan di sini saja Bu. Ditanyai nama-nama jalan tidak tahu, tahunya tentang arah jalan saja cuma lurus, berbelok, sudah tidak tahu arah mata angin. Lebih baik anda duduk bersama ibu-ibu saja, lebih baik karena sama-sama perempuannya. Siapa tahu anda bisa memberikan masukan untuk usaha ternak ibu-ibu di sini, sapi Brahma.

Pernyataan yang dilontarkan oleh salah seorang anggota PKK perempuan:

"Mbak, ibu-ibu PKK itu belajarnya tentang meningkatkan ekonomi rumah tangga skala kecil. Kami belajar meronce, prakarya dari bahan-bahan daur ulang, dan ada lomba penggemukkan sapi. Jenis sapi di sini Brahma. Pernah dulu sapi Jawa tapi sulit balik modalnya, soalnya susah gemuknya. Mantri hewan di desa ini sampai kami paksa bagaimana menggemukkan sapi Jawa, katanya memang segitu saja bobotnya. Kalau Brahma yang kami jaga ini mantap mbak. Gemuk, harganya mahal, makannya bisa dioplos menggunakan makanan selain rumput, jadinya enak untuk ibu-ibu, tidak perlu cari rumput panas-panasan. Ada arisan yang hadiahnya sapi, jadi semangat karena enak jadi punya uang sendiri [15].

Para perwakilan perempuan yang hadir sebagai undangan juga menyatakan ketegasannya agar pembuatan peta bencana dengan peta wisata dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Alasannya adalah bencana yang terjadi di desa banyak diketahui oleh para laki-laki, sebab mereka lebih banyak beraktivitas di luar rumah. Sedangkan para perempuan lebih banyak beraktivitas di rumah untuk mengatur ekonomi keluarga, bila ada kegiatan menghasilkan penambahan uang maka modelnya pun yang bisa dilakukan di rumah seperti beternak sapi Brahma. Pola pikir perempuan yang masih mencoba membedakan pembagian kerja domestik antara laki-laki dan perempuan [16], akan sangat membahayakan perempuan atas keterbatasannya memahami kondisi ekologis mereka yang rawan bencana tsunami.

Cara laki-laki dan perempuan bersikap dalam kegiatan pemetaan potensi masalah dan bencana, menyebabkan ketidakberimbangan pengetahuan yang dimiliki keduanya. Seperti ulasan di awal, Desa Wojo merupakan desa yang memiliki potensi bencana salah satunya tsunami, terlebih lagi saat kegiatan tambang muncul cukup mengubah cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Perempuan semakin sadar bahwa meningkatkan ekonomi keluarga penting dilakukan oleh mereka, namun hal tersebut membuat mereka enggan untuk lebih peduli dengan ancaman tsunami yang ada di Pantai Golo pasca berhentinya tambang. Sebagai ibu rumah tangga, ketidakamanan ekonomi keluarga menjadi lebih penting daripada ketidakamanan ekologis (ancaman tsunami saat adanya kegiatan tambang), seperti yang dinyatakan pula oleh Western, dkk bahwa ketidakamanan ekonomi menyebabkan stratifikasi sosial yang berbeda antara ibu rumah tangga dan yang tidak [16].

4. Penutup

Kehidupan masyarakat yang tinggal di tepian hutan menjadi berubah pasca munculnya kegiatan pertambangan di Desa Wojo. Masyarakat yang akrab dengan kegiatan pertanian di lahan *tetelan* berubah menjadi pekerja tambang. Pasca tambang berhenti karena belum adanya perizinan lebih lanjut, masyarakat mengalami kebingungan masalah pekerjaan. Ruang ekologis mereka berubah untuk kegiatan pertambangan, sehingga kebiasaan masyarakat bertani menjadi hilang semenjak tahun 2012. Uang yang mereka dapatkan dari kegiatan pendekatan yang dilakukan pemilik tambang khusus bagi para perempuan dijadikan sebagai modal usaha. Maka hal ini berimplikasi pada cara pandang laki-laki dan perempuan memetakan potensi bencana dan masalah yang ada di desa mereka. Hasilnya adalah perbedaan laki-laki dan perempuan dalam melihat ancaman bencana dalam kehidupan keseharian, laki-laki menilai bahwa pasca adanya tambang, daerah Pantai Golo berpotensi tsunami karena pelanggaran area penyedotan pasir yang menyebabkan air laut semakin tinggi ke wilayah permukiman, namun perempuan tidaklah menemui permasalahan ini. Perempuan tidak menyadari adanya permasalahan meningkatnya air laut karena ruang aktivitas mereka masih

berkutat di dalam rumah. Potensi ancaman bagi mereka adalah ekonomi rumah tangga yang menurun, sehingga mereka lebih berfokus mengembangkan usaha ternak sapi Brahma. Ancaman bencana tsunami bukanlah merupakan masalah bagi kelompok perempuan khususnya para ibu rumah tangga.

References

- [1] Marten, G. G. (2001). *Human Ecology Basic Concepts for Sustainable Development*. London: Earthscan.
- [2] Nurhadi, I., Amiruddin, L., & Rozalinna, G. M. (2015). *Struktur Sosial Baru Pasca Kehadiran Perusahaan Tambang (Analisis Strukturasi Pierre Bourdieu Pada Masyarakat Desa Wojo, Kabupaten Malang)*. Malang.
- [3] Collapse, T. R. (2010). "Lapindo, Jer Basuki(ku) Mawa Bea(mu)" dalam *Java Collapse, dari Kerja Paksa Hingga Lumpur Lapindo*. Sleman: Insist dan Walhi.
- [4] Edwards, M. (2011). *The Oxford Handbook of Civil Society*. New York: Oxford University Press.
- [5] Istiawan, H. (2013, September). *Ratusan Warga Malang Selatan Persoalkan Tambang Pasir Besi*. Retrieved from <http://daerah.sindonews.com/read/784643/23/ratusan-warga-malang-selatan-persoalkan-tambang-pasir-besi-1379496448>.
- [6] Rozalinna, G. M., & Amiruddin, L. (2017). *Politisasi Lingkungan Oleh Aktor Perhutani dalam Kasus Koperasi Tambang III di Kabupaten Malang*. Malang.
- [7] Rozalinna, G. M., & Amiruddin, L. (2018). *Politisasi Lingkungan Oleh Aktor Perhutani dalam Kasus Koperasi Tambang Indonesia III (Tiga) di Kabupaten Malang-Jawa Timur*. *Kawistara Volume 8 No. 2*, 111-212.
- [8] Walhi. (2016, Agustus). *Menangkan Gugatan Kasasi, Walhi Jatim Minta BLH Segera Buka Informasi Pertambangan Pasir Besi Di Kabupaten Malang*. Retrieved Maret 2019, from <http://walhijatim.or.id/2016/08/menangkan-gugatan-kasasi-walhi-jatim-minta-blh-segera-buka-informasi-pertambangan-pasir-besi-di-kabupaten-malang/>.
- [9] Ratna. (2015, Agustus 15). *Sumbangan Pemilik Tambang*. (G. M. Rozalinna, Interviewer)
- [10] Gieryn, T. F. (2000). A Space for Place in Sociology. *Annual Reviews Annu. Rev. Sociol.*, 26:463–96.
- [11] Jankowski, P. (2009). Towards Participatory Geographic Information Systems for Community-Based Environmental Decision Making. *Journal of Environmental Management*, 1966-1971.
- [12] Jkn. (2018, Agustus 1). *Proses PGIS*. (G. M. Rozalinna, Interviewer)
- [13] Polm. (2018, Agustus 1). *Proses PGIS*. (G. M. Rozalinna, Interviewer)
- [14] Sts. (2018, Agustus 1). *Proses PGIS*. (G. M. Rozalinna, Interviewer)
- [15] Myn. (2018, Agustus 1). *Proses PGIS*. (G. M. Rozalinna, Interviewer)
- [16] Western, B., Bloome, D., Sosnaud, B., & Tach, a. L. (2012). Economic Insecurity and Social Stratification. *Annu. Rev. Sociol.*, 38:341-359.
- [17] Berman, R. W. (2006). *Assesing Urban Design: Historical Ambience on The Waterfront*. UK: Lexington Books.
- [18] See, A. A. (2015). Sustainable Tourist Environment: Perception of International Women Travelers on Safety and Security in Kuala Lumpur. *Procedia-Social and Behavioral Science* 168, 123-133.
- [19] Shiva, V., & Mies, M. (2005). *Ecofeminism*. Yogyakarta: IRE Press.
- [20] Wilkes, D. S. (2004). Understanding service-oriented architecture. *The Architecture Journal*, 1(1), 10-17.